

## ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MODEL SIRKULAR DI KABUPATEN BANYUMAS

Anggara Setya Saputra<sup>1\*</sup>, Rindy Putri Hapsari<sup>2</sup>, Johar Mamuri<sup>3</sup>, Nidya Ayu Wulandari  
Ramdan<sup>4</sup>, Devit Bagus Indranika<sup>5</sup>  
<sup>1,3,4,5</sup> Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia  
<sup>2</sup>Universitas Sriwijaya, Indonesia

\*Korespondensi: [anggara@unwiku.ac.id](mailto:anggara@unwiku.ac.id)

### ABSTRAK

Permasalahan sampah di Kabupaten Banyumas menjadi isu krusial sejak terjadinya krisis sampah pada tahun 2018 yang dipicu oleh keterbatasan Tempat Pembuangan Akhir dan meningkatnya volume sampah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas dengan menggunakan model sirkular dalam perspektif kebijakan publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur berdasarkan berbagai penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Banyumas telah mengalami transformasi dari pola konvensional menuju sistem berbasis ekonomi sirkular melalui program seperti pengelolaan sampah dari hulu, pemberdayaan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi seperti RDF dan aplikasi digital. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi kendala pada aspek sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, serta konsistensi pelaksanaan program. Model sirkular menunjukkan bahwa proses kebijakan berjalan secara berulang mulai dari perumusan masalah hingga evaluasi yang menghasilkan inovasi kebijakan baru. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa keberhasilan pengelolaan sampah di Banyumas dipengaruhi oleh integrasi kebijakan, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan inovasi berbasis ekonomi sirkular.

**Kata Kunci:** model sirkular; kebijakan publik; pengelolaan sampah

### ABSTRACT

*Waste management in Banyumas Regency has become a critical issue since the waste crisis in 2018, triggered by limited landfill capacity and increasing waste volume. This study aims to analyze waste management policy in Banyumas using a circular policy model perspective. The method used is a qualitative descriptive approach through literature study based on previous research. The results show that waste management policy in Banyumas has transformed from a conventional system to a circular economy-based system through upstream waste management, community empowerment, and technological innovations such as RDF and digital applications. However, implementation still faces challenges in human resources, community participation, and program consistency. The circular model indicates that the policy process is iterative, from problem formulation to evaluation, leading to continuous policy improvement. The study concludes that successful waste management in Banyumas depends on policy integration, community participation, and sustainable circular innovations.*

**Keywords:** *circular model; public policy; waste management*

## A. PENDAHULUAN

Permasalahan sampah menjadi isu penting dalam pembangunan lingkungan yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk serta perubahan pola konsumsi Masyarakat (Khalimah et al., 2024). Kabupaten Banyumas merupakan salah satu wilayah yang menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah, khususnya sejak terjadinya krisis sampah pada tahun 2018. Kondisi tersebut disebabkan oleh terbatasnya kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta meningkatnya volume sampah harian yang tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang memadai (Sutalhis et al., 2024). Kondisi tersebut menimbulkan dampak lingkungan yang cukup besar, seperti meningkatnya pencemaran serta menurunnya kualitas kesehatan masyarakat, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan kebijakan secara lebih menyeluruh (Rosyidah, 2024).

Sebelum dilakukan reformasi kebijakan, sistem pengelolaan sampah di Banyumas masih didominasi oleh pendekatan konvensional, yaitu kumpul, angkut, dan buang (Putranto et al., 2022). Pola tersebut dinilai kurang efektif dalam jangka panjang karena hanya menitikberatkan pada pemindahan sampah ke TPA tanpa disertai upaya pengurangan dari sumbernya. Dampaknya, terjadi penumpukan sampah serta tingginya ketergantungan terhadap TPA yang memiliki kapasitas terbatas. Permasalahan ini semakin kompleks akibat rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memilah sampah, serta terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung

pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas mulai mengembangkan kebijakan pengelolaan sampah yang berbasis ekonomi sirkular. Pendekatan ini menggeser paradigma dari sekadar membuang sampah menjadi upaya pemanfaatan kembali sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi (Haryati, 2021). Program seperti “Sumpah Beruang” merupakan salah satu inovasi kebijakan yang mengintegrasikan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat (Pambudi et al., 2025). Melalui pendekatan ini, sampah dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai, seperti kompos, bahan bakar alternatif, hingga produk daur ulang yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Model ini menekankan penerapan prinsip pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang (*reduce, reuse, recycle*) sebagai upaya untuk meminimalkan timbulan sampah sejak dari sumbernya (Pazqara, 2022). Berbagai program kemudian diinisiasi, seperti pembentukan bank sampah, penguatan peran masyarakat dalam pemilahan sampah, serta pengembangan teknologi pengolahan sampah yang lebih ramah lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi melalui pemanfaatan kembali sampah menjadi produk yang memiliki nilai guna (Yusuf et al., 2023).

Namun demikian, penerapan model sirkular dalam pengelolaan sampah di Banyumas masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah

rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah, yang berdampak pada belum optimalnya efektivitas kebijakan (Cudjoe et al., 2020). Selain itu, keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, serta kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan turut menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan program (Prebanić & Vukomanović, 2023). Oleh karena itu, dibutuhkan strategi kebijakan yang lebih terpadu dengan melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, guna mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya efektif, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dalam perspektif ilmu kebijakan publik, fenomena tersebut dapat dianalisis melalui model sirkular yang memandang kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis dan berlangsung secara berulang (Geissdoerfer et al., 2020). Model ini meliputi tahapan perumusan masalah, formulasi kebijakan, implementasi, hingga evaluasi yang saling berkaitan dan mendorong perbaikan kebijakan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas dengan menggunakan pendekatan model sirkular guna memahami proses kebijakan, mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi, serta menilai keberlanjutan inovasi yang telah diterapkan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur dari berbagai jurnal ilmiah, artikel,

serta dokumen kebijakan terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap sejumlah penelitian terdahulu yang relevan, termasuk kajian mengenai implementasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat, serta transformasi kelembagaan dalam pengelolaan sampah (Kriyantono, 2022). Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara sistematis. Pendekatan analisis yang digunakan mengacu pada model sirkular kebijakan yang mencakup tahapan perumusan masalah, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi, hingga evaluasi (Singh et al., 2023).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perumusan Masalah Kebijakan**

Permasalahan utama dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas bersumber dari ketidakseimbangan antara jumlah sampah yang dihasilkan dengan kapasitas sistem pengelolaan yang tersedia (Putranto et al., 2022). Besarnya jumlah penduduk serta meningkatnya aktivitas konsumsi menyebabkan volume sampah terus meningkat setiap harinya (Kurniawati, 2022). Namun, keterbatasan sistem pengelolaan, baik dari sisi sarana, prasarana, maupun kelembagaan, menyebabkan sebagian besar sampah belum tertangani secara optimal. Rendahnya tingkat keterangkutan sampah serta belum terbentuknya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah turut memperburuk kondisi tersebut (Alifiyah et al., 2025).

Krisis sampah yang terjadi pada tahun 2018 menjadi momentum penting

yang menandai ketidakmampuan sistem pengelolaan sebelumnya. Peristiwa tersebut tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memunculkan tekanan sosial dan politik bagi pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah strategis. Dalam konteks ini, perumusan masalah tidak hanya dipahami sebagai persoalan teknis, melainkan juga sebagai persoalan struktural yang melibatkan aspek kebijakan, perilaku masyarakat, serta kapasitas kelembagaan (Rosyidah, 2024).

## 2. Formulasi Kebijakan

Sebagai respons terhadap krisis tersebut, pemerintah daerah mulai merumuskan kebijakan yang berorientasi pada perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah. Pendekatan yang diterapkan tidak lagi berfokus pada pembuangan akhir, melainkan pada pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Konsep ini menekankan pentingnya pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, pengurangan volume sampah, serta pemanfaatan kembali sampah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi (Zainarti & Kirana, 2026).

Formulasi kebijakan ini turut didukung oleh pengembangan inovasi berbasis teknologi serta pemberdayaan masyarakat. Program-program seperti pengelolaan sampah berbasis digital dan penguatan peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) menjadi bagian dari strategi yang diterapkan. Dengan demikian, kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat *top-down*, tetapi juga mengakomodasi partisipasi masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan sampah (Pambudi et al., 2025).

## 3. Adopsi Kebijakan

Tahap adopsi kebijakan ditandai dengan penetapan berbagai regulasi yang

menjadi dasar hukum dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Pemerintah daerah menerbitkan peraturan yang mengatur strategi serta arah kebijakan pengelolaan sampah secara menyeluruh, termasuk mendorong penerapan sistem berbasis masyarakat dan ekonomi sirkular (Utama, 2025).

Program seperti “Sumpah Beruang” menjadi simbol kebijakan yang tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah lingkungan, tetapi juga berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Pratami et al., 2025). Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai sektor lainnya menjadi faktor kunci dalam memperkuat legitimasi serta menjamin keberlanjutan kebijakan.

## 4. Analisis Model Sirkular

Model sirkular dalam analisis kebijakan menunjukkan bahwa proses pengelolaan sampah di Banyumas berlangsung secara dinamis dan berulang. Setiap tahapan kebijakan saling berkaitan serta menghasilkan umpan balik yang dimanfaatkan untuk menyempurnakan kebijakan pada tahap berikutnya (Mahrani & Husamah, 2025). Hal ini terlihat dari bagaimana krisis sampah mendorong perumusan kebijakan baru yang kemudian diimplementasikan dan dievaluasi guna menghasilkan inovasi lanjutan. Pendekatan ini menegaskan bahwa kebijakan publik bukanlah proses yang statis, melainkan terus berkembang mengikuti dinamika permasalahan dan kebutuhan masyarakat (Kasyfilham & Al Akbar, 2025). Dalam konteks Banyumas, model sirkular mampu mendorong terbentuknya sistem pengelolaan sampah yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas bersifat kompleks

dan multidimensional, tidak hanya terkait dengan tingginya volume sampah, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan sistem pengelolaan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kapasitas kelembagaan yang belum optimal. Krisis sampah pada tahun 2018 menjadi titik balik penting yang mendorong terjadinya perubahan kebijakan secara signifikan. Dalam konteks ini, perumusan masalah tidak lagi dipahami secara sempit sebagai persoalan teknis, melainkan sebagai persoalan struktural yang melibatkan interaksi antara kebijakan, perilaku masyarakat, dan dukungan kelembagaan. Kondisi tersebut kemudian mendorong pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif dengan mengedepankan pendekatan berbasis sumber, partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sampah.

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Banyumas telah menunjukkan arah menuju penerapan model ekonomi sirkular yang menitikberatkan pada pengurangan, pemanfaatan, serta pengolahan kembali sampah menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi. Adopsi kebijakan melalui berbagai regulasi dan program inovatif seperti “Sumpah Beruang” mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan inklusif. Analisis dengan model sirkular menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan bersifat dinamis dan terus mengalami penyempurnaan melalui proses evaluasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan sampah di Banyumas tidak hanya ditentukan oleh kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku

kepentingan dalam membangun sistem yang adaptif, partisipatif, serta berorientasi jangka panjang.

#### **D. KESIMPULAN**

Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas telah mengalami transformasi mendasar, dari pendekatan konvensional menuju pendekatan berbasis model sirkular yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan model sirkular sebagai kerangka analisis yang mampu menunjukkan bahwa kebijakan tidak berjalan secara linear, melainkan melalui siklus berulang yang memungkinkan terjadinya perbaikan dan inovasi secara berkelanjutan. Keaslian penelitian ini juga terlihat dari integrasi antara konsep ekonomi sirkular, pemberdayaan masyarakat, serta tata kelola kolaboratif dalam konteks kebijakan publik di tingkat daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan formal, tetapi juga oleh kemampuan sistem dalam mengelola umpan balik dan beradaptasi terhadap dinamika permasalahan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam memperkaya pendekatan analisis kebijakan yang berbasis siklus dan berorientasi pada keberlanjutan.

Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan publik yang efektif harus bersifat dinamis, partisipatif, serta berorientasi jangka panjang. Penerapan pengelolaan sampah berbasis sirkular terbukti mampu mengurangi pencemaran sekaligus menekan volume sampah yang dibuang ke lingkungan. Kebijakan ini juga mendorong

perubahan perilaku masyarakat agar lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Selain itu, pengelolaan sampah yang inovatif dapat menciptakan nilai tambah serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Keberhasilan kebijakan tersebut menunjukkan pentingnya komitmen pemerintah, didukung oleh regulasi yang jelas dan konsisten dalam menunjang implementasi kebijakan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa pengelolaan sampah berbasis model sirkular tidak hanya relevan diterapkan di Banyumas, tetapi juga berpotensi menjadi model yang dapat diadaptasi di berbagai daerah lain dengan karakteristik yang serupa.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Alifiyah, U., AM, M. A., Putri, C. F. K., Andini, A., Latifah, S. A., & Satispi, E. (2025). Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah terhadap Perilaku Masyarakat di Kawasan Perkotaan: Studi Kasus Kota Tangerang Selatan. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(3), 4510–4519.
- Cudjoe, D., Yuan, Q., & Han, M. S. (2020). An Assessment of the Influence of Awareness of Benefits and Perceived Difficulties on Waste Sorting Intention in Beijing. *Journal of Cleaner Production*, 272, 123084.
- Geissdoerfer, M., Pieroni, M. P. P., Pigosso, D. C. A., & Soufani, K. (2020). Circular Business Models: A Review. *Journal of Cleaner Production*, 277, 123741.
- Haryati, T. (2021). Implementasi Green Economy dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. *Jurnal Pengabdian Masyarakat SENSASI*, 1(01), 52–59.
- Kasyfilham, F., & Al Akbar, N. (2025). Evaluasi Tata Kelola Sampah Yogyakarta Pasca-Piyungan: Studi Komparatif dengan Model Ekonomi Sirkular Banyumas. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 10(1), 152–181.
- Khalimah, M. A. N., Febrizan, A., & Nur, D. M. M. (2024). Problematika Sampah dan Upaya Masyarakat Menjaga Kebersihan Lingkungan dengan Memanfaatkan Sampah Menjadi Sebuah Kerajinan di Desa Besito, Gebog, Kudus. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI)*, 1(5), 1–7.
- Kriyantono, R. (2022). *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif: Edisi Kedua*. Prenada Media.
- Kurniawati, R. D. (2022). Pengelolaan Sampah dari Sumbernya: Strategi Mengatasi Dampak Pertumbuhan Penduduk. *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan*, 3(2), 65–71.
- Mahrani, E. P., & Husamah, H. (2025). Analisis Pengelolaan Sampah Sirkular di Kabupaten Banyuwangi sebagai Respon terhadap Program “Internasional Project STOP.” *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Biologi*, 11(1), 78–83.
- Pambudi, D. P., Rohmah, N. S., Khairurrizqo, K., Rahmawati, T., & Ramdlani, M. R. F. R. (2025). Analisis Keberhasilan Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas. *SOSIO DIALEKTIKA*, 163–184.

- Pazqara, E. W. (2022). Problematika Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(2).
- Pratami, R., Kasih, K. D., & Putri, R. A. (2025). Menakar Kapasitas Kebijakan di Balik Inovasi Program Sumpah Beruang Kabupaten Banyumas. *JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN)*, 8(02), 815–833.
- Prebanić, K. R., & Vukomanović, M. (2023). Exploring Stakeholder Engagement Process as the Success Factor for Infrastructure Projects. *Buildings*, 13(7), 1785.
- Putranto, F. R., Yuniningsih, T., & Dwimawanti, I. H. (2022). Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(1), 73–89.
- Rosyidah, H. (2024). Penerapan Prinsip Good Governance dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas: Studi Kasus era Achmad Husein. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 4(02), 257–278.
- Singh, R., Khan, S., & Dsilva, J. (2023). A Framework for Assessment of Critical Factor for Circular Economy Practice Implementation. *Journal of Modelling in Management*, 18(5), 1476–1497.
- Sutalhis, M., Nursiwan, & Novaria, E. (2024). Analisis Manajemen Sampah Rumah Tangga di Indonesia: Literatur Review. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 4(2), 97–106.
- Utama, E. I. C. (2025). Integrated Plastic Waste Management Innovation In Banyumas: Transforming Environmental Threats Into Eco-Friendly Products And Economic Opportunities. *Proceeding of Geo Tourism International Conference*, 1(1).
- Yusuf, M., Kurniasih, D., & Saputra, A. S. (2023). Governing Green Open Space in Indonesia: Barriers and Opportunities to Enhancing Enviromental Quality. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(3), 424–439.
- Zainarti, Z., & Kirana, Z. A. (2026). Optimalisasi Pemanfaatan Sampah Bernilai Ekonomis dalam Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) di Kota Medan melalui Kegiatan Daur Ulang. *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 4(1), 26–39.